
**PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN
(PERENCANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SELAT NASIK)**

Eliza

Universitas Bangka Belitung
E-mail: helizapkp123@gmail.com

Diterima:

22 Januari 2021

Direvisi:

Disetujui:

Abstrak

Wilayah Kecamatan Selat Nasik merupakan kepulauan yang terdiri atas kurang lebih dua puluh delapan pulau besar dan kecil. Namun tidak semua pulau yang ada di kecamatan ini berpenghuni. Saat ini wilayah kepulauan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan. Kebijakan-kebijakan pembangunan kemudian dibuat sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya pembangunan pada daerah kepulauan, seperti di Kecamatan Selat Nasik. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di Kecamatan Selat Nasik serta untuk menggambarkan perencanaan kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Selat Nasik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Koontz, dkk tentang pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari data wawancara yang dilakukan dengan Bupati, Camat, BAPPEDA dan juga masyarakat Kecamatan Selat Nasik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tiga hasil, yaitu faktor pendukung, faktor penghambat yang mempengaruhi pembangunan di Kecamatan Selat Nasik dan juga menjelaskan kebijakan pemerintah daerah untuk Kecamatan Selat Nasik sudah ditetapkan, yakni menetapkan Kecamatan Selat Nasik sebagai kawasan Mina-Agro-Wisata dan sudah mendapat persetujuan dari masyarakatnya, serta menjelaskan sekurang-kurangnya ada enam kebijakan yang diambil untuk terlaksananya Kawasan Mina-Agro-Wisata

Kata Kunci: *Wilayah Kepulauan, Perencanaan Kebijakan, Pembangunan*

Abstract

This district approximately consists of twenty large and small islands. Meanwhile, not all of the islands in this district are inhabited. Currently, archipelagic regions have become one of the government's focuses on development. Subsequently, development policies are made as an effort to encourage the implementation of development in archipelagic regions, such as Selat Nasik District. Therefore, this study aims to identify the factors that support and obstruct the development of Selat Nasik District and to portray the policy planning taken by the local government in escalating the development of Selat Nasik District. The theory used in this study is proposed by Koontz et al. regarding decision making. Meanwhile, the method of this study is qualitative descriptive, and the primary data in this research were obtained through interviews

with the Regent, the Head of District, the Regional Body for Planning and Development and the society of Selat Nasik District. The results of this study depict that there are several factors that affect the development of Selat Nasik District, and also there are several policies set by the local government for Selat Nasik District, including appointing this district to be Agromina-Tourism spot which has been approved by the society and explaining at least six policies which are taken to implement the Agromina-Tourism spot.

Keywords: Archipelagic Regions, Policy Planning, Development.

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya seperti letak geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebijakan yang diterapkan untuk mempercepat proses pembangunan. Sebagai negara dengan wilayah kepulauan terbanyak di dunia, Indonesia memiliki berbagai ciri geografis seperti jalur transportasi, pemukiman penduduk pesisir dan juga variasi pembangunan wilayah kepulauan (Ginting, 2016). Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia terdapat banyak wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Di Bangka Belitung sendiri terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang didalamnya juga terdapat ratusan pulau baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Salah satu kawasan kepulauan yang berpenghuni adalah wilayah kecamatan Selat Nasik yang ada di Pulau Belitung. (Theresia *et al.*, 2014) berpendapat bahwa pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat sederhananya dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (alam, manusia, kelembagaan, serta nilai sosial budaya) yang ada dan bisa di akses oleh masyarakat.

Wilayah Kecamatan Selat Nasik merupakan kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 28 pulau besar dan kecil. Namun tidak semua pulau yang ada di kecamatan ini berpenghuni. Secara administratif, Kecamatan Selat Nasik terdiri dari empat desa, yaitu Desa Selat Nasik yang juga merupakan ibukota kecamatan, Petaling, Suak Gual dan Gersik (Ismet, 2018). Terkait dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa mandiri, Kecamatan Selat Nasik menjadi salah satu bagian dari Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), sehingga upaya pengembangan dan pembangunan di kawasan kepulauan harus terus ditingkatkan. (Ghalib, 2005) dalam bukunya yang berjudul ekonomi regional, berpendapat bahwa berbagai kebijakan nasional dan daerah perlu dibuat dan digunakan sebagai dasar dari pembangunan suatu wilayah (daerah). Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) juga merupakan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sebagai wujud dari Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada tahun 2016 Kecamatan Selat Nasik sudah memiliki SK Bupati Belitung dan peraturan Bupati Belitung terkait KPPN (Ismet, 2018). Berbagai model atau variasi kebijakan coba dibuat oleh pihak pemerintah daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan daerah serta kondisi alam yang ada di wilayah tersebut supaya tepat sasaran.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembangunan terkait dengan tata letak wilayah Selat Nasik yang merupakan wilayah kepulauan dan mengenai bagaimana perencanaan kebijakan yang diterapkan oleh pihak pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pembangunan di Kecamatan Selat Nasik.

Penelitian ini mengambil dan menggunakan beberapa penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan referensi, tinjauan serta acuan untuk penelitian yang dilakukan. Pertama, penelitian telah dilakukan pada tahun 2011 dalam jurnal yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Pulau Kecil Perbatasan Berbasis Geopolitik, Daya Dukung Ekonomi dan Lingkungan (Kasus Pulau Pulau Kecil Perbatasan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara) dari departemen pemanfaatan sumber daya perikanan IPB (Biasane *et al.*, 2011). Kedua, penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2012 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Sistem Rujukan Kesehatan Daerah Kepulauan di Kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau” dari Universitas Gajah Mada dan Dinas Kesehatan Kabupaten (Luti *et al.*, 2012). Ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan (Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara)” dari Universitas Sam Ratulangi (Londa, 2016). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan mengkaji mengenai pembangunan di wilayah kepulauan dan berfokus pada perencanaan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Selat Nasik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Mumtaz, 2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami berkenaan dengan perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, serta kata-kata atau bahasa (Moleong, 2010). Berdasarkan definisi di atas maka penelitian ini akan menemukan data-data yang ada dilapangan tentang perencanaan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Selat Nasik. Pendekatan ini cukup relevan untuk mengkaji apa yang menjadi fokus peneliti pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah peneliti akan menggambarkan perencanaan kebijakan pembangunan wilayah Kecamatan Selat Nasik. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 6 April sampai dengan 20 April tahun 2020 yang bertempat di lokasi Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung .

Teknik penemuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses pembangunan di Kecamatan Selat Nasik yang memadai untuk memberikan informasi, seperti bupati Kabupaten Belitung, camat Kecamatan Selat Nasik, pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Belitung dan masyarakat Kecamatan Selat Nasik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik saat proses pengumpulan data untuk mendapatkan atau memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan diteliti.

- Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur, yakni teknik wawancara yang memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Peneliti sejak awal berfokus pada perencanaan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Selat Nasik.

- Dokumentasi

Eliza

Dalam penelitian yang akan dilakukan bentuk dokumentasi yang ditampilkan berupa data-data penelitian, jurnal dan skripsi, koran online dan foto-foto saat wawancara.

Kemudian data yang sudah didapatkan dilapangan akan dianalisis peneliti dengan menggunakan tiga tahapan. Pertama, reduksi data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokan data. Kedua, display data. Data yang di display dapat disajikan dalam bentuk tabel, matriks, chart, atau grafik dan lain sebagainya. Ketiga, penarikan kesimpulan. Data yang telah disusun sedemikian rupa dikaitkan dengan pola, model, hubungan sebab akibat dan persamaan pendapat lain akan muncul kesimpulan dari apa yang telah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan untuk Kecamatan Selat Nasik

a) Penetapan Kebijakan

Hasil penelitian ini yang pertama adalah mengenai menetapkan kebijakan yang dianggap sesuai dengan kondisi dan juga lingkungan yang ada di Kecamatan Selat Nasik, yaitu dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada serta peluang untuk pengembangan lanjutan di masa mendatang. Ada beberapa poin penting yang bisa diambil, yaitu antara pembangunan fisik dan non fisik harus berimbang agar tercapainya kesejahteraan. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di Kecamatan Selat Nasik disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang ada (Riant, 2007). Begitu juga dengan pendapat dari masyarakatnya mereka menginginkan pembangunan yang terintegritas, pembangunan berfokus pada SDM, pembangunan pada beberapa infrastruktur umum dan juga pembangunan yang merata antar sektornya, yakni sektor pertanian, perikanan dan juga pariwisata. Dari telaah yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah seperti yang terdapat dalam Perda No. 3 tahun 2014 menetapkan Kecamatan Selat Nasik sebagai Kawasan Mina-Agro-Wisata (Ismet, 2018).

b) Penetapan Kecamatan Selat Nasik Sebagai Kawasan Mina-Agro-Wisata

Kecamatan Selat Nasik memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah pada beberapa sektor, terutama sektor perikanan, pariwisata dan pertanian (Ismet dkk, 2018). Sektor perikanan kemudian dijadikan sebagai komoditas unggulan yang mampu mendukung pengembangan pariwisata dan pertanian. Berangkat dari hal ini kemudian Mina-Agro-Wisata ditetapkan sebagai tema pengembangan kawasan di Kecamatan Selat Nasik. Penetapan Kecamatan Selat Nasik sebagai kawasan Mina-Agro-Wisata merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pada kawasan ini. Penetapan Kecamatan Selat Nasik sebagai kawasan Mina-Agro-Wisata juga disetujui oleh pihak masyarakat.

Dalam penetapan perencanaan kebijakan pemerintah untuk Kecamatan selat Nasik, maka disimpulkan bahwa perencanaan kebijakan dibagi ke dalam beberapa bidang. Terdapat setidaknya enam perencanaan kebijakan yang akan dilakukan di Kecamatan Selat Nasik, yaitu kebijakan pengembangan sentra perikanan terpadu berbasis perikanan tangkap dan perikanan budidaya, kebijakan pengembangan pariwisata berupa wisata alam, wisata edukasi, dan wisata budaya, kebijakan pengembangan pertanian berbasis holtikultura guna meningkatkan pendapatan masyarakat, kebijakan peningkatan kualitas SDM lokal dan inovasi teknologi untuk mendukung pengembangan potensi kawasan, Kebijakan pengelolaan kawasan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan tingkat desa, kawasan dan kabupaten, serta

kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar permukiman dan perwujudan keseimbangan lingkungan.

Berikut ini tabel terkait perencanaan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan Kecamatan Selat Nasik Sebagai Kawasan Mina-Agro-Wisata:

Tabel 1. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Mina-Agro-Wisata Kecamatan Selat Nasik Tahun 2018

No	Kebijakan	Strategi Kebijakan
1	Kebijakan pengembangan sentra perikanan terpadu	Penyediaan <i>hatchery</i> komunal dan individual, optimalisasi fungsi PPI, penyediaan pabrik es dan <i>cold storage</i> , membangun kerja sama dengan pelaku pasar, peningkatan konektivitas antar sentra perikanan, penguatan fungsi BUMDes, peningkatan kualitas SDM
2	Kebijakan pengembangan pariwisata	Promosi pariwisata, peningkatan SDM, pengembangan wisata alam, pengembangan wisata edukasi, pembangunan amenitas, pengembangan wisata budaya
3	Kebijakan pengembangan pertanian berbasis hortikultura	Inovasi teknologi, intensifikasi perkebunan, pemanfaatan hutan secara efektif dan optimal, penguatan fungsi BUMDes, pembangunan dan peningkatan kerjasama, Peningkatan kualitas SDM
4	Kebijakan peningkatan kualitas SDM dan inovasi teknologi	Pemberian pelatihan keterampilan, pelatihan SDM untuk pengelolaan kelembagaan, Pelibatan sekolah kejuruan, Pemberian pelatihan pemasaran produk
5	Kebijakan pengelolaan kawasan melalui penguatan kelembagaan	Pembentukan dan penguatan kelembagaan tingkat desa, pembentukan dan penguatan kelembagaan tingkat kabupaten, pelatihan SDM untuk pengelolaan kelembagaan, pembentukan dan penguatan kelembagaan tingkat kawasan
6	Kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar permukiman	Fungsionalisasi system penyediaan air minum, pemenuhan listrik di pulau-pulau kecil, pembangunan system jaringan drainase terintegrasi, pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas transportasi laut, pembangunan infrastruktur pendukung sarana jalan

B. Faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan di Kecamatan Selat Nasik

a) Faktor pendukung pembangunan di Kecamatan Selat Nasik

Secara umum, setiap pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari faktor yang memengaruhinya, baik itu faktor pendukung ataupun faktor penghambat dalam pembangunan. Terdapat beberapa faktor pendukung yang memengaruhi pembangunan di Kecamatan Selat Nasik, yaitu sumber daya alam, kebijakan dan potensi wilayah di Kecamatan Selat Nasik. Sumber daya alam Kecamatan Selat Nasik yang merupakan wilayah kepulauan sehingga kaya akan perikanan dan juga memiliki banyak sumber daya alam laut lainnya yang melimpah. Kondisi alam ini menguntungkan bagi Kecamatan Selat Nasik dalam melakukan pembangunan terutama pada sektor perikanan dan juga pariwisata. Faktor selanjutnya adalah kebijakan, sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam menunjang terlaksananya pembangunan yang merata bagi setiap wilayah termasuk di Kecamatan Selat Nasik. Berikut ini faktor pendukung perencanaan pembangunan di Kecamatan Selat Nasik.

Tabel 2. Faktor pendukung perencanaan pembangunan di Kecamatan Selat Nasik Tahun 2018 (Kuncoro, 2018)

No	Faktor Pendukung	Keterangan
1	Sumber daya alam	Sumber daya alam Kecamatan Selat Nasik yang merupakan wilayah kepulauan yang kaya akan sumber daya lautnya memberikan keuntungan terhadap pembangunan, terutama di bidang perikanan dan pariwisata.
2	Kebijakan	Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wilayah Kecamatan Selat Nasik memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan yang akan dilakukan. Sebagian besar pembangunan yang dilakukan membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah. Dengan kebijakan yang ditetapkan diharapkan bisa memberikan dorongan terhadap pembangunan yang dilakukan.
3	Potensi Wilayah	Potensi wilayah yang dimiliki Kecamatan Selat Nasik memberikan pengaruh besar, terutama untuk pelaksanaan pembangunan yang dilakukan berdasarkan potensi wilayah. Seperti perikanan, pertanian dan pariwisata.

Sumber: Hasil wawancara penelitian

b) Faktor Penghambat Pembangunan di Kecamatan Selat Nasik

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat pembangunan yang ada di Kecamatan Selat Nasik seperti persoalan integritas, sumber daya manusia, letak geografis, serta perubahan dan pergeseran rencana pembangunan yang di sebabkan oleh wabah Covid-19. Berikut ini tabel faktor yang memengaruhi pembangunan di Kecamatan Selat Nasik

Tabel 3. Faktor Penghambat Pembangunan di Kecamatan Selat Nasik (Ginting, 2016)

No	Faktor Pendukung	Keterangan
1	Integritas	Faktor integritas memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa tingkat integritas yang masih rendah berdampak terhadap perlambatan pembangunan atau ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan yang dilakukan. Seperti lemahnya fungsi dari kelembagaan dan juga rendahnya kualitas SDM dalam kelembagaan.
2	Sumber Daya Manusia	Kurangnya SDM yang memadai membuat pelaksanaan pembangunan mengalami keterlambatan. SDM memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan terlaksana atau tidaknya pembangunan di suatu wilayah. Seperti kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan hasil sumber daya alam yang ada.
3	Letak geografis	Kerana wilayah Kecamatan Selat Nasik Terpisah dari daratan utama, membuat akses transportasi hanya satu jalur, yaitu jalur perairan yang tentunya memakan waktu tidak sebentar. Dengan kondisi ini pembangunan menjadi sedikit terhambat. Terutama untuk pembangunan fisik yang membutuhkan bahan material untuk pembangunannya. Proses penyediaan bahan material ini sedikit lama karena harus melintasi lautan terlebih dahulu.
4	Wabah Covid-19	Wabah yang menyerang saat ini memberikan pengaruh terhadap pembangunan, karena sebagian besar dana dialihkan untuk menangani wabah covid-19.

Sumber: Hasil wawancara

C. Perencanaan Kebijakan

a) Kebijakan Ditetapkan Berdasarkan Potensi Wilayah

Penetapan perencanaan kebijakan pemerintah untuk Kecamatan Selat Nasik merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan berdasarkan potensi wilayah dan peluang berkembangnya potensi tersebut pada masa yang akan datang. Potensi masing-masing wilayah kemudian ditetapkan komoditas unggulan yang diharapkan mampu untuk menunjang pengembangan potensi lainnya. Komoditas unggulan dari Kecamatan Selat Nasik adalah sektor perikanan yang terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

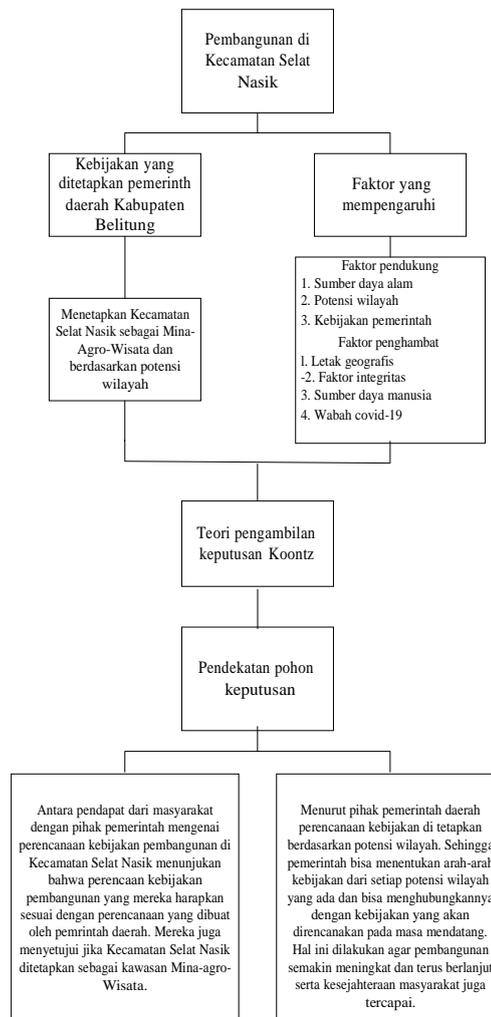
Melihat dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk Kecamatan Selat Nasik bahwa jelas kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang berfokus pada pengembangan kawasan melalui potensi wilayah yang dimiliki dan juga kebijakan ditetapkan dengan melihat berbagai tindakan yang bisa berkembang pada masa mendatang. Berkaitan dengan empat pendekatan modern, dapat dilihat bahwa pendekatan yang digunakan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Belitung adalah pohon keputusan (Pranoto, 2006). Mengapa demikian, karena kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung berfokus pada pengembangan potensi wilayah untuk jangka panjang.

b) Kebijakan Pembangunan Melalui Pendekatan Pohon Keputusan

Dalam buku yang ditulis (Koontz, 2010) menjelaskan banyak hal terkait dengan pengambilan keputusan, termasuk pendekatan-pendekatan modern yang bisa digunakan dalam mengambil keputusan. Terdapat empat pendekatan yang bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu

- Pendekatan analisis resiko
- Pendekatan pohon keputusan
- Pendekatan bantuan pohon keputusan
- Pendekatan preferensi (Koontz, 2010)

Pada awal penelitian dilakukan terdapat empat pilihan pendekatan dari teori pengambilan keputusan yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dasar dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam melihat arah-arah dari beberapa titik perencanaan kebijakan yang diambil. Karena kemudian arah-arah dari kebijakan ini berpengaruh terhadap kesbijakan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Berikut ini skema kebijakan untuk Kecamatan Selat Nasik:



Gambar 1. Skema Kebijakan untuk wilayah Kecamatan Selat Nasik

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pihak pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan khusus untuk wilayah Kecamatan Selat Nasik setelah yaitu, menjadikan wilayah Kecamatan Selat Nasik sebagai kawasan Mina-Agro-Wisata. Penelitian ini di dalamnya juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kecamatan Selat Nasik baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Adapun faktor pendukung pembangunan di Kecamatan Selat Nasik, yaitu kebijakan, potensi wilayah dan kondisi geografis. Selanjutnya terdapat juga faktor penghambat dalam pembangunan di Kecamatan Selat Nasik, yaitu persoalan integritas, SDM, letak geografi, dan wabah Covid-19.

Diharapkan ada penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah untuk wilayah kepulauan dan juga penelitian terkait pengukuran keberhasilan dari kebijakan pemerintah untuk wilayah kepulauan karena pada penelitian ini peneliti hanya membahas mengenai perencanaan kebijakan untuk wilayah kepulauan.

BIBLIOGRAPHY

- Biasane, Achmad Nasir, Fauzi, Akhmad, Monintja, Daniel R., & Soedharma, Dedi. (2011). Kebijakan Pengelolaan Pulau Kecil Perbatasan Berbasis Geopolitik, Daya Dukung Ekonomi Dan Lingkungan (Kasus Pulau Pulau Kecil Perbatasan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara). *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 2(2), 21–40.
- Ghalib, R. (2005). Ekonomi Regional, Cetakan Pertama. *Bandung: Dicitak Oleh Pustaka Ramadhan*.
- Ginting, Ari Mulianta. (2016). Kendala pembangunan provinsi daerah kepulauan: Studi kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 4(1).
- Ismet. (2018). *Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik*. Jakarta: Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
- Koontz, Harold. (2010). *Essentials of management*. Tata McGraw-Hill Education.
- Kuncoro, Mudrajad. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Londa, Very. (2016). Implementasi kebijakan pendidikan dasar daerah kepulauan (Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara). *Sosiohumaniora*, 18(3), 263–271.
- Luti, Ignasius, Hasanbasri, Mubasysyir, & Lazuardi, Lutfan. (2012). Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem rujukan kesehatan daerah kepulauan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 1(1).
- Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif (XXVII). *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Mumtaz, Fairuzul. (2017). Kupas Tuntas Metode Penelitian. *Penerbit Pustaka Diantara*.
- Pranoto, Susanti. (2006). Pengaruh motivasi dan disiplin terhadap kinerja pegawai Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Psyche*, 53.
- Riant, Nugroho D. (2007). Analisis Kebijakan. *Jakarta: PT. Gramedia Jakarta*.
- Theresia, Aprillia, Andini, Krishna S., Nugraha, Prima G. P., & Mardikanto, Totok. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati ngembangan masyarakat*. Penerbit Alfabeta.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)